



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI  
KE ASRAMA HAJI MEDAN TENTANG PERSIAPAN  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2022M/1443M**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022  
23-25 MEI 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI  
JAKARTA 2022**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Dasar Kunjungan Kerja**

Pelaksanaan kunjungan kerja ke Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib;
3. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
4. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
5. Rapat internal.

## **C. Tujuan**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan masukan tentang persiapan dan permasalahan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Asrama Haji Embarkasi Medan sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

## **D. Waktu Pelaksanaan**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2022.

## **BAB II**

### **HASIL KUNJUNGAN KERJA**

#### **Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M**

Pandemi Covid 19 menjadi pelajaran bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M harus tetap mengedepankan prinsip kewaspadaan wabah penyakit agar jemaah haji dapat lebih siap menghadapi dan mencegah serta dapat beribadah secara khushyuk sesuai dengan ketentuan agama islam. Dampak covid 19 terhadap pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dan tahun 2021 tentu saja berdampak bagi para jemaah haji, baik yang sudah bayar lunas dan seharusnya berangkat pada tahun ini maupun yang calon berangkat pada tahun-tahun berikutnya yang secara otomatis mundur jadwal pemberangkatannya.

Pemerintah Arab Saudi sampai dengan hari ini belum memberikan kepastian apakah seluruh negara dapat memberangkatkan jemaah haji. Tahun 2020 dan 2021 Jemaah haji hanya diperbolehkan bagi Warga negara Asing yang bermukim di Arab Saudi dan bagi warga negara Arab Saudi. Kabar baik adanya harapan bahwa akan adanya haji bagi calon jemaah haji di luar Arab Saudi adalah dicabutnya larangan masuk bagi negara-negara pengirim jemaah haji terbesar pada bulan november tahun 2021. Khusus Indonesia telah dapat mengirimkan jemaah umrahnya ke Arab Saudi sampai sekarang.

Pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memiliki rencana perjalanan serta perencanaan penyelenggaraan ibadah haji dengan memperhatikan perkembangan Pandemi Covid 19 protokol kesehatan agar pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji dapat optimal. Memperhatikan kebijakan terkini di dalam pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Protokol kesehatan dalam beribadah di Masjidil Haram untuk umrah dan Masjid Nabawi Madinah sekarang menggunakan pendaftaran melalui aplikasi sehingga Petugas dan jemaah haji bisa terbisa menggunakan aplikasi. Dalam pembinaan dengan sulitnya pertemuan tatap muka bagi jemaah haji dalam pembinaan manasik haji bagi jemaah haji maka perlu ada media online dengan menggunakan teknologi internet siap pakai yang tersedia atau dengan cara efektif lainnya seperti aplikasi android dan tutorial bimbingan manasik haji lainnya.

Kesiapan petugas haji baik itu pembimbing, tenaga kesehatan dan pendukung lainnya juga harus memiliki kesiapan yang ekstra kuat yang dibekali dengan pengetahuan, kemampuan dan peralatan yang menunjang kinerja petugas. Kesiapan sarana dan prasarana embarkasi haji, hampir seluruh embarkasi asrama haji dijadikan tempat darurat perawatan atau isolasi mandiri bagi penanganan covid

19. Untuk itu seluruh embarkasi asrama haji harus di evaluasi agar tiba saatnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak mengurangi pelayanan bagi jemaah haji. Kesiapan Asrama Haji mengingat aturan protokol kesehatan membuat kapasitas kamar menjadi terbatas sehingga perlu pengaturan yang lebih efisien.

### **Fungsi Asrama Haji**

Kewajiban untuk masuk dalam asrama haji, dimulai pada tahun 1970. Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia (WHO). Ada ketentuan WHO yang mengharuskan warganegara Indonesia yang ingin ke luar negeri dikarantina dulu sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan agar jemaah haji Indonesia di karantina selama lima hari setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba di tanah air.

Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari setelah tiba di tanah air. Penyewaan tersebut sangat besar, selain itu wisma yang disewa memang tidak dipersiapkan untuk jemaah haji. Tidak heran, kalau tidak dilengkapi sarana yang dibutuhkan untuk jemaah haji.

Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu, baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira negara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani Tjokrohandoko, yang memerintahkan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, yang pada waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jemaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami kenaikan sampai tiga kali lipat. Maka, asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta dan Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan.

Sekarang, jemaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi. Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama yang berfungsi untuk melayani calon jemaah haji dari proses awal sampai keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji.

Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di bawah lingkungan Kementerian Agama di bawah tanggung jawab Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Dalam Pelaksanaan Haji, Asrama Haji mempunyai peran yang sangat penting yaitu:

- a. Penyusunan dan perencanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi jamaah haji dan masyarakat lainnya.
- c. Pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset, dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### **Profil UPT Asrama Haji Medan**



UPT Asrama Haji Medan berlokasi di Jl. Jenderal Abdul Harris Nasution Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan. UPT Asrama Haji Medan memiliki sejarah Panjang. Sejalan dengan meningkatnya jumlah Calon Jemaah Haji dari wilayah Sumatera Utara yang menggunakan layanan pesawat terbang, dipandang perlu untuk mengupgrade Bandara Polonia Medan, serta dibangunnya sebuah asrama haji milik sendiri.

Hal ini dibahas dalam suatu pertemuan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara tanggal 15 s.d 17 Maret 1976. Ketika itu baru saja dilaksanakan pemulangan jamaah haji laut dan jamaah haji udara dari tanah suci musim haji 1975 - 1976. Raker/temu pendapat itu diprakarsai Gubernur selaku Koordinator Urusan Haji Dati I Sumatera Utara dan diikuti Gubernur Aceh, Sumbar, Riau, Bupati/Walikota madya

sebagai Koordinator Urusan Haji Dati II se-Sumatera Utara dan sejumlah jamaah haji laut dan udara musim haji tahun 1975/1976.

Berkat kerja keras aparaturnya unsur Perhubungan Udara Pusat dan Daerah serta semua pihak terkait landasan pacu Bandara Polonia Medan dapat diperluas sehingga dapat didarati pesawat DC-10 dan yang sejenis. Pada tanggal 2 September 1979 pukul 14.00 Wib diadakan percobaan pendaratan perdana DC-10 yang berjalan mulus. Setelah itu, pada tanggal 30 September 1979 pukul 06.55 Wib dengan pesawat DC-10 berkapasitas 305 penumpang, diangkut kloter I calhaj yang berasal dari Dati II Asahan 5 orang, Medan 251 orang, Simalungun 5 orang, Tapsel 30 orang dan Kodam II/BB 18 orang.

Sedangkan jumlah calhaj tahun 1979/1980 sebanyak 4.463 orang terdiri dari pria 1.933 orang dan wanita 2.530 orang tergabung dalam 15 kloter. Perinciannya Dista Aceh 752 orang, Sumatera Utara 1.729 orang, Sumatera Barat 1.157 orang, Riau 617 orang, ABRI 86 orang, setoran khusus Sumatera Utara 117 orang dan petugas 5 orang. Mengenai Asrama Haji, pembangunannya dirasakan sudah mendesak, sebab sejak diberlakukannya ketetapan Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Medan dengan status sebagai salah satu Pelabuhan Haji Udara, memberangkatkan calhaj langsung dari Medan – Jeddah. Memang ada Asrama Transit dan asrama mukim bagi calhaj tapi masih status menyewa kepada YPHI dan Departemen Kesehatan.

Oleh karena itu menindak lanjuti hasil rapat terpadu di Aula Kantor Gubsu 15 s.d 17 Maret 1976, maka tahun 1977 diadakan pengajuan lokasi pertapakan pembangunan asrama haji udara Polonia Medan yang ditinjau langsung oleh KaKanwil Dep.Agama Prov. Sumut Drs. H. Abd. Djalil Mohd, Kastaf Koordinator Urusan Haji H. Ismail Sulaiman, Kasubag Pelaksanaan Pengendalian Program Kanwil Depagsu Amir Rusly Thaib dan 2 orang dari Biro Perencanaan Departemen Agama Jakarta dengan DIP Proyek Peningkatan Fasilitas Perjalanan Haji di desa Pangkalan Masyhur Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Lahan pertapakannya merupakan tanah penduduk dengan keadaan tanah sebagiannya ditumbuhi lalang dan ditanami kelapa dan cengkeh sedangkan sebagian lagi merupakan tanah rawa.

Pada tahun 1978 tanah tersebut dibebaskan untuk pertapakan Sarana Penyelenggaraan Pengasramaan jamaah calon haji seluas 30.188 meter persegi dengan harga sebesar Rp.67.923.000,- dana dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Kegiatan pembangunan asrama haji udara Medan dilakukan secara bertahap mulai peninjauan pencarian tanah lokasi pertapakan untuk pembangunan gedung, pematangan tanah, pembangunan gedung-gedung dan sarana lainnya disesuaikan dengan dana yang tersedia. Sumber dana pembangunan asrama haji

udara Medan berasal dari DIPA Departemen Agama, bantuan Pemda melalui APBD, dana Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji melalui cash program (Non DIP), dan sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.

Kegiatan pembangunan Asrama Haji Medan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pada tahun 1978, awal pembangunan Asrama Pelabuhan Haji Udara Polonia Medan desa Pangkalan Masyhur Titi Kuning Kecamatan Gedung Johor Medan seluas 300 m<sup>2</sup> kapasitas 17 orang dengan biaya sebesar Rp. 24.873.000.- (sekarang gedung Raudoh) yang dikerjakan oleh PT. Maribu Raya pimpinan Arifin Matondang. Gedung ini cikal bakal pertama Kantor Badan Pengelola Asrama Haji Udara Polonia Medan. Pada tahun 1979 dibangun asrama penginapan petugas dan pembantu P3H di sebelah Barat bangunan terdahulu (Gedung A s.d Aula IV) seluas 400 m<sup>2</sup> berkapasitas 60 orang dengan dana sebesar Rp. 27.200.000.-

Pada tahun 1979/1980 dibangun penginapan jamaah haji seluas 1.114 m<sup>2</sup> berkapasitas 278 orang dengan dana sebesar Rp. 85.500.000.- (Gedung B / Aula VI sekarang gedung Jabal Rahmah dan Gedung C) dan pembangunan Mesjid seluas 300 m<sup>2</sup> dengan dana sebesar Rp. 25.750.000.- berkapasitas 250 orang.

Pada tahun 1980/1981 dibangun asrama bertingkat dua seluas 1.685 m<sup>2</sup> berkapasitas 440 orang dan selanjutnya disebut gedung Arafah juga dibangun Aula I (Gedung Madinatul Hujjaj) seluas 1.500 m<sup>2</sup> dengan dana seluruhnya Rp. 123.829.000.-

### **Pertemuan dengan Kakanwil Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Asrama Haji**

Sesuai dengan acara yang telah disusun dan diinformasikan ke Satuan Kerja UPT Asrama Haji Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, setelah tim kunjungan kerja tiba di Medan langsung dilakukan pertemuan. Pertemuan bertempat di Asrama Haji Medan dengan dihadiri langsung oleh Kepala UPT Asrama Haji, Bapak Ramlan, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.

Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai informasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M.



Pada paparannya, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Medan menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi VIII DPR, bahwa dengan perkembangan dinamika masyarakat dan proses modernisasi yang begitu cepat, tuntutan dan harapan terhadap layanan fasilitas Asrama haji terus meningkat sebagaimana layaknya standar layanan hotel bintang 3 (tiga) yang memenuhi aspek standard kenyamanan, keamanan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Selain itu fungsi asrama juga berkembang menjadi multi fungsi tidak hanya untuk kegiatan Ibadah Haji melainkan kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi secara islami dan syariah.

Peluang untuk mewujudkan tuntutan dan harapan tersebut sangat besar dengan meningkatkan kualitas kapasitas dan layanan, serta lokasi Asrama Haji yang sangat strategis secara ekonomi.

Mengenai kendala, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Asrama Haji Medan menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Berkaitan dengan kecukupan fasilitas di Asrama Haji, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Asrama Haji Medan menyampaikan anggaran masih dirasakan kurang terutama pada tahun ini tidak ada honor untuk petugas teknis di embarkasi, menyiasatinya dengan anggaran per program atau per keberangkatan.

Hambatan dan kendala terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022:

- a. Kendala dan hambatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di daerah, rata-rata kurangnya fasilitas kendaraan bagi seksi PHU Kab/Kota untuk melakukan pantauan/monitoring di kecamatan-kecamatan dan juga konsultasi di Kanwil Kemenag
- b. Hambatan yang lain, yaitu, masih adanya Kabupaten/Kota yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah haji dari daerah ke Embarkasi/Debarkasi dan sebaliknya.

## **BAB III**

### **REKOMENDASI**

Dari hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan mengenai Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Utara dan ke UPT Asrama Haji Medan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut hasil kunjungan kerja:

1. Komisi VIII DPR RI perlu menindaklanjuti masukan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Medan mengenai usulan peningkatan anggaran persiapan haji di embarkasi di tahun mendatang untuk memaksimalkan pelayanan terhadap calon jemaah haji.
2. Masih terdapat beberapa kekurangan anggaran, terutama untuk porter dan tenaga teknis di embarkasi. Perlu menjadi masukan untuk pembahasan BPIH di tahun mendatang.
3. Komisi VIII DPR RI dalam membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu mendapatkan masukan yang lebih banyak dari para calon jemaah haji, sehingga diperlukan kunjungan kerja ke daerah lain.

**TIM KUNKER SPESIFIK**

**KOMISI VIII DPR-RI**